

## DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita*, 5, 1–11.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75.
- Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2), 117–124.
- Handayani, N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 911–924.
- Hanifa, L. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(4), 640–651. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1571>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"*, 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS SRIWIJAYA*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Labi, A. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 - 2015. *Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1355–1370.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Nirwana, Seseang, R. H., & Salsabila, A. (2023). Analysis of Regional Financial Conditions in Local Governments of Enrekang Regency, South Sulawesi

- Province, Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3), e01014. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1014>
- Patarai, M. I. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah* (F. Goenawam, Ed.; 2nd ed.). De La Macca.
- Pilat, J. J., & Marosa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability*, 6(1), 45–56.
- Sari, I., Assari, M., & Hidayah, I. S. N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Akuntansi*, 408–420.
- Setyowati, W., Setiyono, T. A., Gung, G., & Novriyanti, B. (2023). Leveraging Technology in Accounting for Entrepreneurial Insight into Government Budgeting Efficiency. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 5(3), 251–260. <https://doi.org/10.34306/att.v5i3.340>
- Sugiarto, A., & Mutiarin, D. (2017). Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 1–38. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4170>
- Tenrinippi, A. (2020). Understanding Decentralization and Regional Autonomy Policy Towards The Village Autonomy. *Meraja*, 3(1), 1–13.
- Tumija, & Ghina, S. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(2), 61–78.
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang  
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah  
Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah